



investor (sumber pendanaan) organisasi. Biasanya, para investor organisasi ini dapat berupa pemerintah, swasta, atau kreditor. Adapun hubungan antara pelaku ekonomi ini, yakni organisasi dan investor, berjalan sesuai dengan *agency theory* (teori keagenan).

Menurut teori keagenan, hubungan dua pelaku ekonomi dengan perbedaan kepentingan disebut sebagai agen dan prinsipal (Sengaji, 2018). Kedudukan prinsipal dijelaskan sebagai pihak yang memberikan perintah ke orang lain (agen) supaya menjalankan aktivitas jasa atas nama prinsipal, dengan kewenangan berada di pihak agen untuk mengambil keputusan yang paling tepat untuk prinsipal (Octalianna & Rahayuningsih, 2013). Perintah yang diberikan prinsipal akan didukung dan dilaksanakan oleh agen apabila kedua pihak, baik prinsipal maupun agen, memiliki tujuan yang sama.

Namun, hubungan keagenan di antara keduanya bisa saja menimbulkan masalah apabila terjadi konflik atau perbedaan kepentingan di antara keduanya. Pemisahan antara fungsi kepemilikan (*ownership*) dengan fungsi pengendalian (*control*) kerap kali menjadi alasan permasalahan tersebut (Sukmawati, Pujiningsih, & Laily, 2016). Salah satu upaya untuk membatasi munculnya konflik dalam hubungan keagenan adalah dengan menentukan kontrak yang efisien. Namun, upaya ini juga belum efektif untuk menjadi solusi, sehingga munculah konsep *corporate governance* (Ahmad & Septriani, 2008).

Objek pada penelitian ini adalah Kelompok Pengelola Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu yang berlokasi di Desa Sebatu, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Bali. Sebagai organisasi sektor publik, Pengelola Objek Wisata dan Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar tentu diharapkan telah mempraktikkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Alasan peneliti melakukan penelitian di Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu yaitu adanya fenomena trend peningkatan yang cukup signifikan dalam jumlah pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu.

Observasi yang telah dilakukan terlihat bahwa pada tahun 2020 dengan 2021 pendapatan pada Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu mengalami penurunan karena adanya wabah penyakit Covid-19. Kemudian pada tahun 2022 sampai 2023 pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Desa Sebatu mengalami peningkatan yang drastis dari tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan bahwa Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu memiliki daya tarik yang kuat sehingga dikunjungi banyak wisatawan.

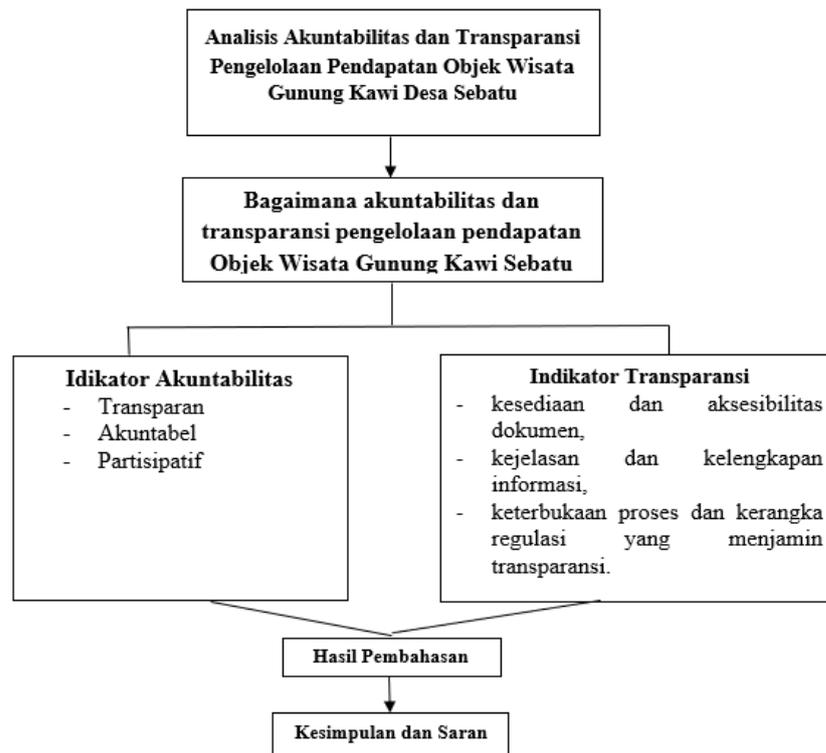
Di samping alasan di atas, alasan lain dalam memilih Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu sebagai adalah karena terdapat ketimpangan antara teori dengan praktik di lapangan. Yaitu, pengelolaan pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu oleh Dinas Pariwisata Kabupaten

Gianyar tidak memberikan laporan pengeluaran pendapatan kepada pemberi amanah (prinsipal), yaitu Pemerintah Desa Sebatu. Pihak pengelola hanya melakukan pembagian hasil yang diperoleh dari pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu yaitu untuk Dinas Pariwisata sebesar 60% dan untuk Desa Adat sebesar 40% dari pendapatan. Hal tersebut menyalahi teori yang dikemukakan oleh Hehanussa (2015), bahwa pengelola (agen) wajib mempertanggungjawabkan, memberikan laporan, dan kegiatan kepada pemberi amanah (prinsipal). Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar yang berkedudukan sebagai agen, seharusnya mampu mengimplementasikan nilai akuntabilitas dan transparansi yang ditunjukkan kepada masyarakat desa sebagai prinsipal, apalagi dana yang dikelola juga berjumlah besar.

Pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu yaitu dari penjualan tiket. Pendapatan dari penjualan tiket tersebut perharinya akan dibuatkan laporan lalu disetor ke dinas dalam bentuk kwitansi laporan. Lalu pendapatan dari Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu dikumpulkan perbulannya, dari pendapatan perbulannya itu akan dibagi ke desa adat Sebatu. Dari pendapatan tersebut desa adat sebatu mengajukan surat pengajuan ke dinas untuk mencairkan dana 40% yang akan dicairkan per tiga bulan ke rekening desa adat dan diberikannya laporan pendapatan tamu pengunjung Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu. Dari laporan yang diberikan oleh dinas akan di balance kan ke laporan Objek Wisata Gunung Kawi sebatu langsung. Dari pendapatan yang 40% itu akan di sampaikan ke masyarakat desa adat melalui pesangkepan secara lisan yang akan dilaksanakan per tiga bulan sekali dalam pesangkepan itu hanya total jumlah pendapatannya saja yang disampaikan ke masyarakat dan tidak ada laporan rinciannya. Berdasarkan penemuan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan analisis mendalam mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu.

Selain itu, ditemukan juga kasus serupa terjadi pada kelompok pengelola (agen) terhadap pihak pemerintah desa (prinsipal) di mana agen tidak memberikan laporan rincian pendapatan kepada prinsipal sehingga fenomena ini dapat menjadi informasi tambahan untuk mengatakan bahwa nilai akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola Objek Wisata Gunung Kawi belum dipraktikkan dengan baik. Padahal, penerapan nilai akuntabilitas publik merupakan hal yang wajib dilakukan oleh para agen guna mempertanggungjawabkan segala tanggungjawabnya kepada para prinsipal, sebagaimana prinsipal juga memiliki berhak dan berwenang menerima pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018:27). Urgensi penelitian ini juga didukung dengan minimnya penelitian yang mengangkat topik akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan pada objek wisata.





Jenis dan sumber data yang digunakan di sini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan, yakni terdiri dari bendesa adat dan pengelola Objek Wisata Gunung Kawi Desa Sebatu. Sementara itu, data sekunder didapatkan melalui pengumpulan dokumen dan catatan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu. Data lainnya yang digunakan dalam penelitian ini seperti literatur, *e-journal*, dan *internet surfing* yang berkaitan dengan penelitian. Dengan demikian, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan juga studi dokumentasi. Adapun teknik analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, dengan melalui serangkaian tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Sejarah Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu

Pura Gunung Kawi Sebatu menurut sejarah, diperkirakan dibangun sekitar tahun 1300 hingga 1500-an Masehi. Pura ini konon dibangun untuk memuja Dewa Wisnu atas perintah Rsi Markandeya. Rsi Markandeya adalah seorang guru yang berasal dari Kerajaan Majapahit, penyebar agama Hindu dari Jawa. Beliau mempunyai pengaruh terhadap Nusantara, juga Kerajaan Bali. Pura ini juga menjadi tempat penyimpanan abu jenazah Raja Anak Wungsu, salah

satu raja Bali dari dinasti Warmadewa yang memerintah pada abad ke-11 Masehi. Pura Gunung Kawi Sebatu termasuk dalam pura Dhang Khayangan. Yang artinya semua umat Hindu bisa masuk dan sembahyang di pura ini. Mengingat ini masih pura, tempat suci umat Hindu, diwajibkan untuk menggunakan pakaian adat yang sudah disediakan di area loket untuk disewakan kepada pengunjung. Pura Gunung Kawi Sebatu menarik perhatian yang luar biasa dari wisatawan, baik wisatawan domestik maupun internasional. Berdiri di lahan yang luas, pura ini terletak di atas lahan seluas 5.000 m<sup>2</sup> yang sekelilingnya terdapat oleh hutan, tebing, dan sumber air yang melimpah. Suasana di pura ini sangat sejuk, hijau, dan damai. Arsitekturnya unik dan memiliki keindahan tersendiri.

### **Akuntabilitas Dalam Proses Pengelolaan Pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Desa Sebatu**

Akuntabilitas diartikan sebagai sebuah keharusan untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja dan tindakannya kepada pihak lain yang berhak dan berwenang memintanya (Kuswanti, 2020). Mahmudi (2016:19) mengemukakan akuntabilitas publik merupakan tanggung jawab pemerintah (*agent*) untuk mengelola, melaporkan, dan mengungkapkan kepada pemberi manfaat (*principal*) atas tindakan yang berkenaan dengan penggunaan sumber daya publik.

Apabila dihubungkan dengan penelitian ini yang menggunakan teori keagenan, variabel akuntabilitas direpresentasikan kepada kondisi di mana Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar (*agent*) bertanggung jawab untuk mengelola, melaporkan, dan mengungkapkan pengelolaan pendapatan kepada masyarakat setempat (*principal*).

Dilihat dari prakteknya, akuntabilitas pengelolaan pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu masih kurang baik. Berdasarkan hasil penelitian didapat unsur-unsur akuntabilitas menurut Tahir (2019) yaitu :

#### 1. Transparan

Pada pengelolaan pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Desa Sebatu proses transparansi sudah baik. Dimana adanya laporan pendapatan hanya sebatas jumlah dari pengunjung wisatawan yang datang dan besaran nilai pendapatan. Pendapatan ini akan dibagi 60% untuk pengelola yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar dan 40% untuk Desa Adat Sebatu, dari pendapatan ini yang ke Desa Adat Sebatu dalam pencairan dana bendesa adat harus melakukan surat pengajuan ke dinas, lalu pada saat pencairan dana dinas akan melakukan transper dana dan memberikan laporan pendapatan dari laporan ini akan di cocokan ke laporan Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu. Pembagian pendapatan ini dipakai

untuk sarana prasaran objek wisata gunung kawi sebatu untuk menata objek wisata dan juga kebersihan objek wisata. Namun pada kenyataannya kurangnya transparansi mengenai laporan yang disampaikan kepada masyarakat atas pengelolaan pendapatan ini tidak dirinci dengan baik, sehingga masyarakat hanya mengetahui besarnya saja tanpa mengetahui secara rinci pendapatan itu digunakan untuk apa saja.

## 2. Akuntabel

Pada pengelolaan pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu adanya keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan pendapatan sudah baik. Bukti laporan pendapatan objek wisata gunung kawi sebatu dilaporkan dalam bentuk kwitansi laporan yang disetorkan ke dinas pariwisata setiap hari. Selain itu laporan pertanggungjawaban Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu sudah direkap dan ditulis dalam bentuk laporan setiap harinya akan dijumlahkan pendapatan perbulannya dari berapa tamu yang masuk dan berapa jumlah uangnya yang masuk agar sesuai.

## 3. Partisipatif

Partisipatif dalam pengelolaan pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Desa Sebatu sudah dilakukan yaitu adanya keterlibatan masyarakat dalam penerimaan dan pemanfaatan dari pendapatan tersebut. Dimana laporan mengenai jumlah pendapatan akan disampaikan kepada masyarakat melalui pesangkepan desa. Pesangkepan itu sendiri dilaksanakan tiga bulan sekali, sehingga masyarakat juga mengetahui besarnya pendapatan dari Objek Wisata Gunung Kawi Desa Sebatu.

## **Transparansi Dalam Proses Pengelolaan Pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Desa Sebatu**

Transparansi diartikan sebagai prinsip keterbukaan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk secara luas dan efektif mengetahui dan mengakses data mengenai informasi keuangan. Indikator untuk menilai transparansi meliputi ketersediaan dan kemudahan akses dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, serta keterbukaan proses dan kerangka regulasi penjamin transparansi (Ardiyanti, 2019). Penerapan prinsip keterbukaan pada lingkup pemerintahan adalah sebuah nilai yang fundamental karena termasuk prinsip *good governance*.

Apabila dihubungkan dengan penelitian ini, variabel transparansi diwujudkan pada pengelola Objek Wisata Gunung Kawi Desa Sebatu (*agent*) yang menyediakan informasi akurat kepada masyarakat (*principal*). Hal ini juga selaras dengan teori Stewardship (prinsip keterbukaan), di mana pada penelitian ini, pengelola Objek Wisata Gunung Kawi Desa Sebatu

berfungsi sebagai *stewards* yang memenuhi hak masyarakat (*principal*) untuk menerima informasi faktual.

Dilihat dari prakteknya, transparansi dalam proses pengelolaan pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Sebatu sudah baik. Berdasarkan hasil penelitian didapat unsur-unsur transparansi menurut Ardiyanti (2019) yaitu :

1. Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen

Pada Pengelolaan Objek Wisata Gunung Kawi Desa Sebatu ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, sudah ada dokumen yang digunakan dalam mekanisme pengelolaan pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Desa Sebatu. Hal ini sesuai dengan teori Coryanata, (2015:99), yang menjelaskan transparansi didasarkan pada arus informasi yang terbuka, di mana semua proses dan informasi dapat diakses oleh seluruh pihak yang memiliki kepentingan. Adanya laporan dari jumlah hasil pendapatan yang diperoleh kepada masyarakat melalui rapat setiap tiga bulan sekali. Dengan diadakan rapat tersebut masyarakat dapat informasi mengenai jumlah pendapatan yang diperoleh Objek Wisata Gunung Kawi Desa Sebatu.

2. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi

Terkait dengan informasi pengelolaan pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Desa Sebatu, pembuatan laporan serta penyampaian kepada masyarakat pada Desa Adat Sebatu cukup baik. Dalam hal ini laporan disampaikan dalam bentuk rapat desa adat secara lisan yang dilaksanakan dalam tiga bulan sekali, dalam rapat tersebut akan disampaikan jumlah atau total pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Desa Sebatu.

3. Keterbukaan Proses dan Kerangka Regulasi yang Menjamin Transparansi

Hal ini terkait dengan keterbukaan pengelolaan pendapatan Objek Wisata Gunung Kawi Desa Sebatu. Adanya kerangka regulasi yang memastikan prinsip keterbukaan (transparansi) kepada masyarakat pada Desa Adat Sebatu. Laporan yang diberikan dalam bentuk kwitansi yang disetorkan ke dinas pariwisata setiap harinya dan nantinya akan ditotal setiap bulannya. Laporan ini disampaikan untuk menghindari kecurigaan atau kecurangan dan supaya adanya kesesuaian keadaan objek wisata gunung kawi sebatu dengan laporan yang ada di Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar.



## Daftar Pustaka

- Ardiyanti, R. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Hehanussa, S. J. (2015). kutip 1 (Salomi J. Hehanussa ). Conference in Busniess, Accounting and Management, 2, 82–90.
- Komang Febrianty, Anantawikrama Tungga Atmadja. (2021). Mengungkap Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan pada Pengelolaan Sumber Mata Air Pura Dalem Penyuratan di Banjar Badung Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng Komang Febrianty, Anantawikrama Tungga Atmadja Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia.
- Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Mamanjemen Keuangan Daerah. Andi Offset. Mustaram
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*, Andi : Yogyakarta.
- Octalianna, & Rahayuningsih, D. A. (2013). Analisis Kepemilikan Managerial Berbasis Pada Teori Keagenan. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 15(1), 65–72.
- Putu Riana Putri, Anantawikrama Tungga Atmadja, Nyoman Trisna Herawat. (2019). Strategi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Pakraman pada desa pakraman bresela. (*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol: 10 No: 2. 2614-1930.
- Rosyada, D. (2020). Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan. Jakarta: Kencana
- Sejarah dan Keindahan Pura Gunung Kawi Sebatu: Perjalanan Spiritual Maharsi Markandeya. Sejarah dan Keindahan Pura Gunung Kawi Sebatu: Perjalanan Spiritual Maharsi Markandeya - Bali Padma Bhuwana
- Sengaji, I. 2018. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Kebijakan Desa Terhadap Pembangunan Desa. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Sukmawati, F., Pujiningsih, S., & Laily, N. (2016). Akuntabilitas Gereja dalam Perspektif Alkitabiah dan Stewardship Theory (Study Kasus pada Gereja X di Jawa Timur). *Jurnal Akuntansi Aktual*, 3, 301–310.
- Tahrir, Eni,(2018). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Kendari.